

POWER OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POTENTIAL FOR DEVELOPMENT IN BANDUNG BARAT REGENCY

POTENSI KEKUATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh :

**Agus Rahmat
Lukiati Komala**

Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Email: agusrahmat.fikom@gmail.com

Abstract. For Bandung Barat Regency (KBB), industries sector is the economy main pillar, shown by its contribution to regional income that reached 41.76%. This contribution is twice larger than the contribution of trading and agricultural sectors. The next issue is what should be done so that this power continues to develop and give benefits to the people of Bandung Barat Regency? This study was conducted to answer the proposed issues. Therefore, to obtain the data in order to answer the research problem, the method used is qualitative, with data collection techniques are interviews and literature reviews. Discussion of the data is done by comparison to the theories and concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) as well as what has been done by the government in some countries who are already doing CSR management. The results from this study showed that based on the geographical location of Bandung Barat Regency, the number and composition and distribution of the population shows that Bandung Barat Regency has a high-potential districts to be a developed and prosperous regency. However, this potential has not well coordinated. One of the fundamental of this condition is that the Bandung Barat Regency government has not created the formulation and dissemination on what was to become the main focus for CSR activities of the companies in the region of Bandung Barat Regency.

Keywords: Industry, Corporate Social Responsibility, development, welfare

Abstrak. Sektor industri merupakan penopang utama perekonomian di Bandung Barat (KBB), hal ini ditunjukkan dengan kontribusinya yang mencapai 41,76 % . Kontribusi ini mencapai dua kali kontribusi sektor perdagangan maupun pertanian. Persoalan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan agar kekuatan ini tetap berkembang dan memberi kebaikan pada masyarakat disekitar (Kabupaten Bandung Barat) ? Penelitian ini dilakukan guna menjawab persoalan yang diajukan. Oleh karena itu. Untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya wawancara dan kajian pustaka. Pembahasan atas data dilakukan melalui komparasi pada teori dan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta apa yang sudah dilakukan pemerintah pada beberapa negara yang sudah lebih dulu melakukan pengelolaan CSR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasar letak geografis Kabupaten Bandung Barat, jumlah dan komposisi serta sebaran penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang berpotensi tinggi menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera, hanya saja potensi ini belum terkoordinir secara baik. Salah satu yang mendasar dari kondisi ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum melakukan perumusan dan penyebaran atas apa yang menjadi *main focus* bagi kegiatan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci : Industri, Corporate Social Responsibility, koordinasi, kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sampai saat ini masih terpecah diantara pemikir yang menentang, netral dan mendukung. Pemikiran menentang ditujukan melalui pemikiran salah satunya dikutip Frank de Hond (2007) dari beberapa tokoh manajer, yang pada intinya bahwa, peran yang tepat dari sebuah perusahaan komersial adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan tidak terlibat dalam inisiatif sosial dan lingkungan, atau tegasnya CSR bertentangan dengan praktek bisnis yang baik, yaitu menghasilkan keuntungan (Frank de Hond, 2007).

Kajian dan pemikiran lain menemukan bahwa hampir 80 persen setuju bahwa perusahaan yang mengintegrasikan praktek-praktek yang bertanggung jawab akan lebih kompetitif; dan 73 persen menerima bahwa 'berkelanjutan keterlibatan sosial dan lingkungan secara signifikan dapat meningkatkan profitabilitas. (Financial Times, 18 Juni 2002) Dan pemikiran lain yang menjadi jalan tengah berpendapat bahwa tidak ada konflik antara tujuan sosial / lingkungan dan ekonomi (Gallarotti 1995; Porter dan Kramer 2002; Bonifant, Arnold dan Long 1995; Waddock dan Smith 2000) dalam Frank

de Hond,2007. Diantara pemikiran yang ada yang paling banyak berkembang saat ini adalah pemikiran yang mendasarkan pada keyakinan akan keuntungan pelaksanaan CSR bagi perusahaannya. Dalam tulisan Charito Kruvant dan Barbara Krumsiek sebagaimana tertulis dalam Judith Hennigfeld (2006), ditunjukkan bahwa 'Profitabilitas sangat penting. Namun, banyak perusahaan saat ini menyadari bahwa bisnis yang sukses adalah salah satu yang tidak hanya mendapatkan keuntungan yang dapat diterima, tetapi juga membantu untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup". Ataupun pemikiran dari Jane Nelson (2004) dalam Nina Boeger, bahwa banyak perusahaan yang sadar akan risiko dan biaya tingkat tinggi ketimpangan pendapatan dan degradasi lingkungan (Nelson, 2004). Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan CSR di Indonesia mulai ramai, terlepas apakah pelaksanaannya karena terikat oleh peraturan perundang-undangan, seperti BUMN yang telah mempersyaratkan pemberian sumbangan dari keuntungan tahunan; atau CSR yang tidak terikat peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting untuk dikerjakan perusahaan, baik karena kebutuhan internal perusahaan, maupun

pertimbangan moral, sosial dan kemanusiaan. (Kompas 4/5/2007)

Terlepas dari dua alasan yang mendasari pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana digambarkan Kompas, yang jelas pelaksanaan CSR oleh perusahaan menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah (perwujudan negara) termasuk pemerintah di kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pencapaian masyarakat seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pertanyaan yang muncul dari deskripsi singkat mengenai CSR bagi pemerintah di Kabupaten Bandung Barat adalah Seberapa besar kekuatan CSR untuk membantu pemerintah Bandung Barat untuk akselerasi pembangunan ? Jawaban atas penelitian ini menjadi penting dalam kaitan dengan perumusan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengembangan masyarakat berbasis kepedulian sosial dari perusahaan. Ini mengindikasikan kesesuaian penelitian ini dengan pilar penelitian yang ada, maka penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan beberapa luaran berupa :

Berdasar atas apa yang ada maka penelitian ini terfokus pada bagaimana peta perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat; serta bagaimana pengelolaan Corporate Social

Responsibility (CSR) perusahaan oleh pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sampai saat ini masih terpecah diantara pemikir yang menentang, netral dan mendukung. Pemikiran menentang ditujukan melalui pemikiran salah satunya dikutip Frank de Hond (2007) dari beberapa tokoh manajer, yang pada intinya bahwa, peran yang tepat dari sebuah perusahaan komersial adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan tidak terlibat dalam inisiatif sosial dan lingkungan, atau tegasnya CSR bertentangan dengan praktek bisnis yang baik, yaitu menghasilkan keuntungan (Frank de Hond, 2007).

Kajian dan pemikiran lain menemukan bahwa hampir 80 persen setuju bahwa perusahaan yang mengintegrasikan praktek-praktek yang bertanggung jawab akan lebih kompetitif; dan 73 persen menerima bahwa 'berkelanjutan keterlibatan sosial dan lingkungan secara signifikan dapat meningkatkan profitabilitas. (Financial Times, 18 Juni 2002) Dan pemikiran lain yang menjadi jalan tengah berpendapat bahwa tidak ada konflik antara tujuan sosial / lingkungan dan ekonomi (Gallarotti 1995; Porter dan Kramer

2002; Bonifant, Arnold dan Long 1995; Waddock dan Smith 2000) dalam Frank de Hond, 2007.

Diantara pemikiran yang ada yang paling banyak berkembang saat ini adalah pemikiran yang mendasarkan pada keyakinan akan keuntungan pelaksanaan CSR bagi perusahaannya. Dalam tulisan Charito Kruvant dan Barbara Krumsiek ditunjukkan bahwa 'Profitabilitas sangat penting. Namun, banyak perusahaan saat ini menyadari bahwa bisnis yang sukses adalah salah satu yang tidak hanya mendapatkan keuntungan yang dapat diterima, tetapi juga membantu untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup'. Ataupun pemikiran dari Jane Nelson, bahwa banyak perusahaan yang sadar akan risiko dan biaya tingkat tinggi ketimpangan pendapatan dan degradasi lingkungan (Nelson, 2004).

Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan CSR di Indonesia mulai ramai, terlepas apakah pelaksanaannya karena terikat oleh peraturan perundang-undangan, seperti BUMN yang telah mempersyaratkan pemberian sumbangan dari keuntungan tahunan; atau CSR yang tidak terikat peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting untuk dikerjakan perusahaan, baik karena

kebutuhan internal perusahaan, maupun pertimbangan moral, sosial dan kemanusiaan. (kompas, 4/5/2007)

Terlepas dari dua alasan yang mendasari pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana digambarkan Kompas, yang jelas pelaksanaan CSR oleh perusahaan menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah (perwujudan negara) termasuk pemerintah di kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pencapaian masyarakat seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pertanyaan yang muncul dari deskripsi singkat mengenai CSR bagi pemerintah di Kabupaten Bandung Barat adalah Seberapa besar kekuatan CSR untuk membantu pemerintah Bandung Barat untuk akselerasi pembangunan ?

Fakta telah menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan secara benar, telah memberi dampak besar bagi masyarakat. Sekalipun hanya sebagai Runner Up dari sebuah penghargaan bergengsi, pelaksanaan CSR oleh Riau Pulp telah menghasilkan 84 wiraswastawan lokal yang hebat, dengan 104 kontrak kerja dan mempekerjakan 1303 tenaga kerja. Apa yang telah dicapai Riau Pulp menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat

melaksanakan CSR dengan cara mandiri atau dilakukan secara sendiri. Bryan (2003) sebagaimana dikutip Dilek Cetindamar dan Kristoffer Husoy mengatakan bahwa untuk melaksanakan CSR yang lebih efisien dan produktif perusahaan dapat melakukannya secara mandiri - secara sukarela - dan tidak dalam menanggapi peraturan pemerintah (BryanE, 2003) atau terintegrasi dalam keanggotaan atau organisasi berbasis partisipasi-(Moir, 2001; McKinsey, 2004) Hal ini berarti yang dibutuhkan

atas kegiatan CSR adalah koordinasi perusahaan dengan pemerintah sebagai yang diberi mandat mencapai kesejahteraan.

Keterkaitan diantara perusahaan, masyarakat (komunitas sebuah perusahaan dan pemerintah sebagai regulator, telah digambarkan David E. Hawkin (2006) dalam bukunya *Corporate social responsibility balancing tomorrow's sustainability and today's profitability*, yaitu :

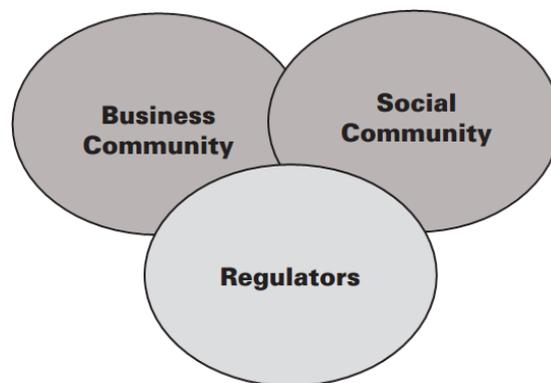


Figure 3.1 The overlapping communities

Gambar 1.1 The overlapping communities

Sumber : Hawkin (2006)

Selain persoalan koordinasi, aspek penting untuk keberhasilan kegiatan CSR adalah aspek integrasi. Dasar pemikiran hal ini adalah persoalan sosial dalam masyarakat tidak pernah atau paling tidak sangat sedikit yang berdimensi tunggal, oleh karena itu tepat apa yang dikatakan Mallin dalam bukunya

Corporate Social Responsibility A Case Study Approach, bahwa “Tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan untuk mengintegrasikan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka dan kegiatan mereka, melampaui kepatuhan terhadap hukum”. (2009)

Aspek lain dari pembenaran atas pelaksanaan CSR secara mandiri (dilakukan sendiri) terkait dengan filosofis (dasar) kebutuhannya perusahaan, seperti ; kepentingan akan pencapaian keuntungan perusahaan (ekonomi), berdasar upaya pemecahan persoalan harian management, kepentingan untuk bertindak dengan benar, atau dilakukan untuk memperoleh legitimasi dan penerimaan oleh masyarakat.

1. Metode Penelitian

Bailey mengartikan metode sebagai alat dalam mendapatkan data atau "... *By "method" we simply mean the research technique or tool used to gather data . .* " (1987; pp.32-33)

Penggunaan metode dalam suatu penelitian menurut Hidayat (2002) merupakan implikasi dari pendekatan/paradigma yang dipergunakan oleh peneliti. Bagi ahli lain seperti Yin, penggunaan metode penelitian ditentukan oleh (1) tipe pertanyaan penelitian, (2) control yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa perilaku yang akan diteliti, dan (3) focus terhadap fenomena penelitiannya (2002:1).

Atas dasar pertimbangan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data utama diperoleh pertama,

berdasarkan atas panduan wawancara yang terstruktur dan didukung oleh beberapa sumber data lain yang berasal dari : dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung; kedua, observasi dalam arti peneliti bertindak secara langsung sebagai pengamat langsung atas kegiatan sehari-hari subyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti selalu diupayakan dengan dua hal, yaitu *informasi* mengenai apa yang terjadi dan *konteks* atau hal-hal yang ada disekitarnya tapi yang berkaitan dengan kejadian .

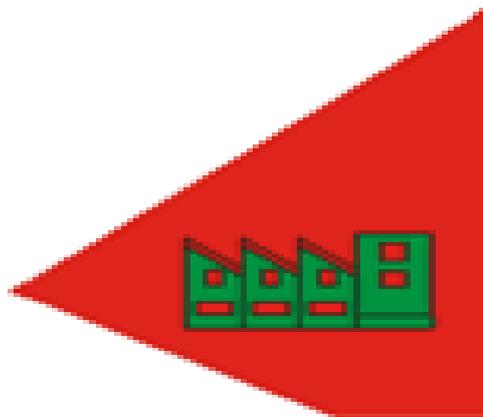
2. Perusahaan di Bandung Barat Sebagai Potensi

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang relatif masih muda dilihat dari tahun keberadaannya, karena kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari induknya yaitu Kabupaten Bandung. Sekalipun baru, Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan salah satu kabupaten yang penting khususnya dalam perekonomian Jawa Barat, baik di lihat dari aspek jalur ekonomi (dilalui dua jalur darat yaitu lintasan kereta api dan tol Cipularang), hal lainnya adalah menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang dibuktikan dengan masuknya kabupaten ini sebagai salah satu Kawasan Perhatian Investasi

(KPI).

Bagi Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu kawasan industri di Jawa Barat merupakan hasil analisa atas kekuatan diri sejak awal berdiri sebagai sebuah kabupaten, hal ini bisa dilihat dari salah satu gambar di lambang atau logo

kabupaten ini yang secara tegas memuat bangunan industri berwarna hijau dengan latar yang berwarna merah (lihat gambar 4.1), sebuah representasi diri yang tegas sebagai kawasan industri yang berbasis Sumber Daya Alam. (BPS Kabupaten Bandung Barat 2015).

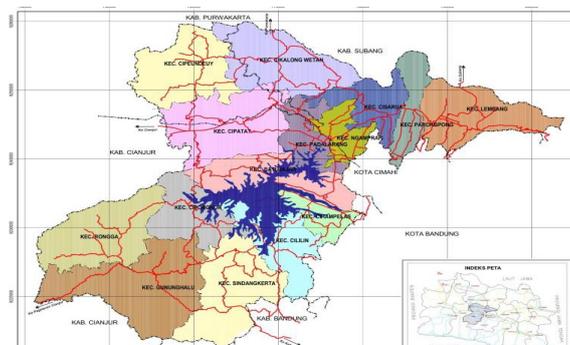


Gambar 1.2 Salah satu gambar dalam logo Kab. Bandung Barat

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2015

Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang berada di tengah-tengah Propinsi Jawa Barat (sebagaimana ditunjukkan melalui gambar 4.1) menyebabkan kabupaten ini tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut, akan tetapi kabupaten ini

tetap menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan ikan (tawar) untuk wilayah Jawa Barat khususnya Bandung raya, karena dua bendungan besar di Jawa Barat ada di kabupaten ini (Saguling dan Cirata).



Gambar 1.3 Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat 2015)

Menjadi tidak mengherankan jika sampai tahun 2015, perekonomian Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh sektor industri. Sektor ini memiliki kontribusi yang besar yaitu 41,76 %. Sektor-sektor lain seperti perdagangan / hotel / restoran menyumbang kontribusi sebesar 21,22 % dan sektor pertanian menyumbang sebesar 11,87 %.

Sektor industri mencakup atas industri besar dan industri sedang, dengan pusatnya mencakup atas empat wilayah (kecamatan) utama, yaitu :Padalarang sebanyak 68 perusahaan (44 persen); Batujajar sebanyak 29 perusahaan (19 persen); Ngamprah sebanyak 26 perusahaan (16 persen); dan Lembang sebanyak 15 perusahaan (10 persen). Jumlah keseluruhan Perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat menurut BPS Kabupaten Bandung Barat yaitu perusahaan besar sebanyak 63 perusahaan dan perusahaan sedang sebanyak 91, sehingga jumlah total perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat 154 Perusahaan (2015)

Kategorisasi industri di Kabupaten Bandung Barat secara lengkap menurut Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

– Industri Makanan mencakup atas :

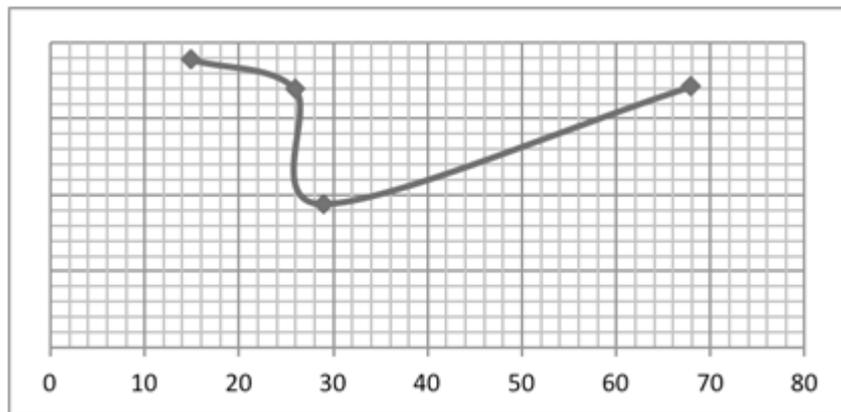
- Pengolahan dan Pengawetan daging, ikan, buahbuahan, sayuran, minyak dan lemak;
- Industri susu dan makan dari susu;
- Industri makanan lainnya
- Industri minuman
- Industri Tekstil :
- Industri pemintalan, pertununan, pengolahan akhir tekstil;
- Industri barang jadi tekstil dan permadani;
- Industri perajutan.
- Industri Pakaian
- Industri pakaian jadi dari tekstil , kecuali pakaian jadi berbulu
- Industri Kulit dan Barang dari Kulit
- Industri kulit dan barang dari kulit (termasuk kulit buatan);
- Industri alas kaki
- Industri Kayu dan Barang anyaman
- Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu, dan sejenisnya
- Industri barang dari kayu, dan barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya
- Industri Kertas dan Barang dr kertas
- Industri Kertas, barang dari kertas
- Industri penerbitan
- Industri Penerbitan
- Industri terkait minyak bumi
- Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi dan Industri

- Barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi
- Industri Kimia dan bahan dari kimia
 - Industri bahan kimia dasar;
 - Industri barang-barang kimia lainnya;
 - Industri serat buatan.
 - Industri Karet dan barang dari karet
 - Industri Karet dan Barang dari karet;
 - Industri Barang dari plastic.
 - Industri Barang Galian bukan logam
 - Industri gelas dan barang dari gelas;
 - Industri pengolahan barang dari tanah liat;
 - Industri semen, kapur dan gips serta barang-barang dari semen dan kapur;
 - Industri barang-barang dari batu;
 - Industri barang-barang dari galian bukan logam Lainnya
 - Industri Dasar logam
 - Industri Logam dasar bukan besi;
 - Industri pengecoran logam.
 - Industri Barang dari Logam
 - Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan; pembuatan tangki dan generator;
 - Industri barang logam lainnya, dan kegiatan jasa pembuatan barang-barang dari logam.
 - Industri mesin
 - Industri mesin-mesin umum;
 - Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus.
 - Industri mesin dan peralatan kantor
 - Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data.
 - Industri radio, TV dan peralatan komunikasi
 - Industri alat transmisi komunikasi;
 - Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya
 - Perakatan kedokteran
 - Industri peralatan kedokteran, peralatan untuk mengukur ,memeriksa, menguji, dan bagian lainnya, kecuali alat-alat optik
 - Alat angkutan
 - Industri alat angkut lainnya
 - Furnitur
 - Industri Furnitur
- Dari sekian banyak perusahaan atau industri, industri yang mendominasi di Kabupaten Bandung Barat terbagi atas lima kelompok besar yaitu :
- industri tekstil (36 perusahaan);
 - industri pakaian jadi (24 perusahaan);
 - industri logam (25 perusahaan);
 - industri karet dan barang dari karet (18 perusahaan); dan
 - industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia (9 perusahaan).
- Sebaran perusahaan di Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki relasi dengan jumlah penduduk, artinya jumlah perusahaan di kabupaten Bandung Barat

tidak berkorelasi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, walaupun demikian secara keseluruhan ke empat wilayah industry ini merupakan wilayah yang tinggi kepadatan penduduknya di banding wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Bandung Barat.. Kaitan jumlah perusahaan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat berdasar data dari kantor statistik kawasan Padalarang ada 68 perusahaan dengan jumlah penduduk mencapai 171174, terdiri atas 86175 orang laki-laki dan 84459 orang perempuan; wilayah Batujajar mencapai 29 perusahaan

dengan jumlah penduduk mencapai 94317 orang, terdiri atas 46.980 orang laki-laki dan 47.337 orang perempuan; wilayah Ngamprah ada 26 perusahaan dengan jumlah penduduk mencapai 169.434 orang terdiri dari 86.184 orang laki-laki dan 83.250 orang perempuan, wilayah Lembang ada 15 perusahaan dengan jumlah penduduk mencapai 188.923 orang yang terdiri dari 96.585 orang laki-laki serta 92.338 orang perempuan.

Peta sebaran perusahaan dan penduduk di Kabupaten Bandung Barat terlihat jelas melalui diagram berikut :



Giagram 1.1 Kaitan sebaran perusahaan dan jumlah penduduk di KBB

Berdasarkan atas data mengenai jumlah, komposisi, serta sebaran perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, nampak bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi untuk tumbuh kembang menjadi sebuah kabupaten

yang maju dan sejahtera (secara ekonomi). Letak geografis serta berkembangnya perusahaan baik dalam jumlah, bidang maupun sebaran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang atau pertumbuhan secara terus menerus.

Perkembangan perusahaan ini bisa diartikan juga sebagai peningkatan atau penambahan kekuatan pemerintah (daerah) sebagai institusi yang mendapat mandat mensejahterakan masyarakat (pembukaan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa alasan mengapa pada akhirnya perkembangan perusahaan menjadi kekuatan bagi pemerintah melalui pemikiran Willis Harman sebagai mana dikutip oleh Jeremy Galbreath dalam Samuel O. Idowu dan Céline Louche, *Theory and Practice of Corporate Social Responsibility*, bahwa , *“business has become [in the twentieth century] the most powerful institution on the planet. The dominant institution in any society needs to take responsibility for the whole”* selanjutnya Galbreath secara tegas mengatakan bahwa *business firms have a hefty responsibility, to support, care for and look after society.*

Dari sisi perusahaan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kebutuhan, hal ini terjadi paling tidak karena dua alasan. Pertama menurut Julie Pirsch, Shruti Gupta, Stacy Landreth Grau bahwa *Companies are under growing pressure to embrace social responsibility, in part due to emerging public standards for social performance*; kedua menurut Ruf et al, 2001; Simpson dan Kohers 2002 dalam

Julie Pirsch, Shruti Gupta, Stacy Landreth Grau bahwa *the most forceful argument for CSR is the positive link it has with a firm's performance*

Berdasar atas apa yang ada di Kabupaten Bandung barat dan kepentingan perusahaan atas kegiatan corporate social Responsibility, maka yang dibutuhkan Kabupaten Bandung Barat adalah menyatukan (kordinasikan) kekuatan-kekuatan yang ada dan terpisah (di pemerintah, perusahaan dan mesyarakat) menjadi sebuah kekuatan yang menyatu dalam menciptakan kebaikan atau mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung barat.

Pengelolaan Kekuatan CSR di Kabupaten Bandung Barat

Keterkaitan diantara pemerintah, pengusaha dan masyarakat atau komunitas atau lingkungan perusahaan secara konsep telah banyak di diskusikan dan di teliti oleh para ahli.

Dari perspektif sejarah, keterkaitan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dapat ditelusuri antara lain dalam *guidelines for social life cycle assessment of products; united nations environment programme, 2009* disebutkan bahwa untuk masalah sosial dan lingkungan bisnis telah ada sejak adanya perdagangan dan bisnis itu sendiri. Operasi penebangan

komersial dan hukum untuk melindungi hutan keduanya dapat ditelusuri kembali hampir 5.000 tahun (KUNINGAN Centre, 2007). Sekitar tahun 1700 SM, Raja Hammurabi Kuno Mesopotamia telah memperkenalkan kode yang termasuk ketentuan yang menurut pembangunan, penginapan atau petani dihukum mati jika kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain atau ketidaknyamanan besar untuk warga setempat.

Saling tarik kepentingan pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadikan pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan pengaturan dan koordinasi. Guler Aras (2009) menulis bahwa *good governance is assumed to provide increased access to capital, lower the cost of capital and thus increase the value of companies.*

Dalam kaitan dengan pertanyaan seperti apa kekuatan CSR di Kabupaten Bandung Barat saat ini ? jawabannya bisa dilihat melalui beberapa temuan sebagai berikut.

Secara normatif, keberadaan perusahaan bagi komunitas atau masyarakat akan member kebaikan, dalam *Corporate social responsibility in a global economy Report* No. 10 (2008–2009) ditulis bahwa perusahaan menguntungkan karena membuat kontribusi penting untuk masyarakat. Mereka menciptakan lapan-

gan kerja dan membantu membiayai kesejahteraan umum dari populasi. Tugas utama perusahaan adalah untuk menciptakan nilai dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat di mana mereka beroperasi”, bahkan dalam laporan tahunan Kabupaten Bandung Barat ditulis bahwa sektor industri memberikan andil paling besar bagi perkembangan ekonomi daerah ini yaitu mencapai 41,76 %, baru disusul bidang lain seperti perdagangan hotel serta restoran sebesar 21,22 %.

Sebagai sebuah kekuatan bagi perkembangan Kabupaten Bandung Barat, maka menjadi keniscayaan untuk di kelola dengan tepat dalam arti perusahaan sebagai sebuah kekuatan mampu dimanfaatkan tanpa harus menimbulkan in-efisiensi atau peningkatan pengeluaran (beban) bagi perusahaan yang semakin besar, karena jika sebaliknya maka CSR hanya akan menjadi beban perusahaan dan akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan.

Masih dalam tataran normative, CSR perusahaan sebagai kekuatan bagi Kabupaten Bandung Barat nampak sudah disadari, hal ini bisa dilihat dari ditetapkannya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 800/kep.327/perekonomian tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bandung Bar-

at, dan dibuatkannya Bandung Barat Corporate Social Responsibility (BBCSR). Kesemua itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan sinergi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan program pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui *Working together Programme*.

Persoalan yang muncul adalah apakah benar bahwa CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah menjadi kekuatan dalam arti apakah keberadaan perusahaan di Kabupaten Bandung Barat telah memberi banyak kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya ?

Fakta mengenai CSR di Kabupaten Bandung Barat bisa diketahui antara lain melalui pendapat dari nara sumber, pertama Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat pada wartawan PRLM. Menurut nara sumber pertama bahwa “Sejumlah perusahaan di Kabupaten Bandung Barat dinilai belum terbuka soal pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Soalnya, Pemerintah daerah tidak menerima banyak laporan soal program CSR tersebut” (PRLM, Februari 2016). Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa “Kami juga terkendala dengan sejumlah perusahaan yang kantornya berlokasi di Jakarta, jadi kemung-

kinan mereka juga menganggap CSR diberikan di Jakarta. Padahal kan seharusnya di daerah tempat usaha.” (PRLM, Februari 2016).

Hal yang sama juga dikatakan nara sumber ke dua yaitu Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada PRLM Februari 2016, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki data pengelolaan program *corporate social responsibility* yang bersinergi dengan program pemerintah daerah”, bahkan secara tegas dia mengatakan bahwa di KBB, “sampai saat ini aspek pemanfaatan dana CSR masih belum dikelola dengan baik. Dia pun tak tahu berapa banyak dana CSR yang diberikan perusahaan untuk mendukung program pemda”.

Berdasar atas apa yang dikemukakan oleh dua nara sumber maka dapat disimpulkan keberadaan perusahaan di Kabupaten Bandung Barat sudah memberi kebaikan bagi masyarakat namun belum banyak. Kesimpulan ini sejalan dengan pendapat Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang secara tegas mengatakan bahwa “CSR ini belum dikelola secara optimal, padahal potensinya sangat bagus buat menambal pembangunan yang belum tertutupi

APBD," (PRLM, Februari 2016)

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan optimalisasi CSR melalui organisasi yang telah dibentuknya (badan CSR), adalah melakukan pengelolaan atas dana CSR di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pengalangan uang oleh Badan CSR terjadi karena pemikiran aparat pemerintah KBB, dana untuk CSR harus masuk dulu ke badan ini. (PRLM, februari 2016). Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nampak berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah Norwegia dan beberapa pemerintah lainnya. Dalam *Corporate social responsibility in a global economy Report No. 10 (2008–2009)*, bahwa pemerintah Norwegia telah menetapkan tiga bidang utama untuk tindakan yang berkaitan dengan CSR. pertama adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam kegiatan Pemerintah sendiri. Kedua adalah menyampaikan harapan masyarakat kepada perusahaan Norwegia. Ketiga adalah mengembangkan dan mempengaruhi kerangka kerja untuk CSR, baik nasional maupun internasional.

Selain itu Marlo Raymond dalam *Defining Corporate Environmental Responsibility Canadian NGO Perspectives* mengatakan yang pada intinya adalah

“pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan CSR, dalam mengkombinasikan regulasi dan mekanisme secara tepat”. (2005). Hal yang menarik dari data yang dikemukakan adalah: pertama, upaya penegakan kegiatan CSR oleh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat masih belum berhasil. Apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebenarnya tidak berbeda dengan pemerintah di wilayah lain, bahkan kondisi ini sama dalam level Negara. Güler Aras dalam *Global Perspectives on Corporate Governance and CSR* menemukan bahwa “hukum untuk menjangkau seluruh perusahaan guna menegakkan tanggung jawab sosial masih jauh dari berhasil”. (Güler Aras, 2009).

Kedua, posisi pemerintah dalam kegiatan CSR di Kabupaten Bandung Barat yang berperan sebagai pengelola dana CSR, berbeda dengan peran pemerintah yang diterapkan di negara lain. Bercermin pada pemikiran beberapa ahli, posisi seperti ini menjadi kurang tepat terkait dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam kaitannya dengan CSR. dalam *Global Perspectives on Corporate Governance and CSR* dari Güler Aras & David Crowther, (2009) menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik diasumsikan untuk memberikan

peningkatan akses permodalan, menurunkan biaya atau modal dan dengan demikian meningkatkan nilai perusahaan. Ketidak tepatan pemikiran para ahli dengan yang dilakukan pemda KBB terutama terkait dengan penurunan biaya atau modal, apa yang dilakukan KBB malah akan meningkatkan biaya atau modal.

Ketidak tepatan lainnya juga dapat dilihat dari pemikirannya Bryan sebagaimana dikutip Cetindamar Kristoffer Husoy (2007) bahwa perusahaan dapat mengatasi masalah tanggung jawab sosial dengan cara yang lebih efisien dan produktif jika mereka diizinkan untuk melakukannya sendiri - secara sukarela - dan tidak dalam menanggapi peraturan pemerintah.

Berdasar pemikiran para ahli, maka nampak bahwa dalam pelaksanaan kegiatan CSR, pemerintah berperan sebagai koordinator melalui kebijakan yang menunjukkan bidang yang menjadi main focus kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasar atas masalah penelitian, fakta serta hasil analisa, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi disimpulkan: pertama, dilihat dari jumlah, komposisi serta sebaran juga

perkembangan perusahaan, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar untuk tumbuh kembang menjadi sebuah kabupaten yang maju dan sejahtera (secara ekonomi); kedua, berdasar posisinya, pemerintah KBB selama ini menempatkan diri hanya sebagai koordinator dalam bidang anggaran yang relatif pasif, pemerintah KBB tidak menunjukkan aktivitas yang menjadi main focus bagi kegiatan CSR yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan simpulan maka agar Kabupaten Badung Barat tetap menjadi wilayah yang tetap menarik untuk berinvestasi maka pemerintah Kabupaten Badung Barat sebaiknya tetap berada pada fungsi pembuatan kebijakan yang lebih pada pemberi arah mengenai main focus kegiatan CSR bagi perusahaan, dan tidak terlibat secara langsung pada hal teknis seperti pengelolaan dana CSR perusahaan di wilayahnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Frank Den Hond, F. G. (2007). *Managing Corporate Social Responsibility in Action Talking, Doing and Measuring*. USA: Ashgate Publishing.
- Dilek Cetindamar, K. H. (2007). *Corporate Social Responsibility Practic-*

- es and Environmentally Responsible Behavior: The Case of The United Nations Global Compact. *Journal of Business Ethics*, 163–176
- Güler Aras, D. C. (2009). *Global Perspectives on Corporate Governance and CSR*. USA: Ashgate Publishing
- Hawkins, D. E. (2006). *Corporate Social Responsibility Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability*. New York,: Palgrave Macmillan.
- Judith Hennigfeld, M. P. (2006). *The IC-CA Handbook on Corporate Social Responsibility* . England: John Wiley & Sons.
- Julie Pirsch, S. G. (2007). A Framework for Understanding Corporate Social Responsibility Programs as a Continuum: An Exploratory Study. *Journal of Business Ethics*, 125–140.
- Mallin, C. A. (2009). *Corporate Social Responsibility A Case Study Approach*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Nasution, S. (1992), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito
- Nina Boeger, R. M. (2008). *Perspectives on Corporate Social Responsibility*. UK: Edward Elgar Publishing.
- Samuel O. Idowu, C. L. (2011). *Theory and Practice of Corporate Social Responsibility*. Berlin: Springer Heidelberg
- Tremblett, A. J. (2005). *Defining Corporate Environmental Responsibility Canadian ENGO Perspectives*. Canada: The Pembina Institute and Pollution Probe.
- Watson, M. L. (2005). The Impact of PR in Creating a More Ethical World: Why Can't We All Get Along? *8th International Public Relations Research Conference Proceedings*. Florida: University of Miami.
- Yin, R.K. (2005), *Studi Kasus Desain & Metode* (alih bahasa M.Djauzi Mudzakir). Jakarta Raja Grafindo Persada
- Zaltman, G. Philip K., & Ira K. , (1992) , *Creating Social Change*, Holt Rinehart and Winston Inc. New York